

Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDes dalam Bidang Administrasi Keuangan, Penyusunan Proposal Usaha, dan Pemasaran Digital di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan

Training on Strengthening the Capacity of BUMDes Management in Financial Administration, Business Proposal Preparation, and Digital Marketing in Modinding District, South Minahasa Regency

Lyndon Reinhart Jacob Pangemanan^{1*)}, Sherly Gladys Jocom¹⁾, Christian David Parengkuan¹⁾

¹⁾Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Manado, Indonesia

*Email Korespondensi: lyndon.p@unsrat.ac.id

Abstrak

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial dalam administrasi keuangan yang sistematis, keterampilan yang kurang memadai dalam menyusun proposal bisnis untuk mendapatkan dukungan pendanaan, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal untuk pemasaran produk. Program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Unsrat, sejalan dengan peta jalan pengabdiannya, bertujuan untuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kepada para pemangku kepentingan desa dan pengelola BUMDes. Program ini berfokus pada pelatihan pembukuan keuangan dasar, teknik penulisan proposal bisnis, dan manajemen pemasaran digital. Hasil kemitraan ini menunjukkan peningkatan keterampilan manajerial dan kapasitas bisnis BUMDes, termasuk penguasaan pembukuan sederhana, kemampuan menyusun proposal bisnis, serta pemahaman yang lebih baik tentang pemasaran digital melalui platform daring, khususnya situs web BUMDes Marketplace, sehingga produk desa menjadi lebih kompetitif dan dipromosikan secara luas.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) often encounter challenges such as limited managerial capacity in systematic financial administration, inadequate skills in preparing business proposals to secure funding support, and suboptimal utilization of digital technology for product marketing. The community service program conducted by Unsrat University, aligned with its service roadmap, aims to provide understanding, training, and mentoring for village stakeholders and BUMDes managers. The program focuses on training in basic financial bookkeeping, business proposal writing techniques, and digital marketing management. The partnership outcomes indicate improved managerial skills and enhanced business capacity of BUMDes, including mastery of simple bookkeeping, ability to develop business proposals, and increased understanding of digital marketing through online platforms, particularly the BUMDes Marketplace website, enabling village products to become more competitive and widely promoted.

Keywords: Empowerment, Human Resource Development, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan sentra hortikultura dengan komoditas utama kentang, wortel, kubis, tomat, dan sayuran dataran tinggi lainnya. Potensi ekonomi desa membuka peluang besar bagi pengembangan BUMDes melalui perdagangan hasil pertanian, pengolahan produk, penyediaan sarana produksi, serta jasa distribusi dan pemasaran. Namun, pengelolaan BUMDes masih menghadapi kendala dalam manajemen usaha, administrasi keuangan, penyusunan proposal, dan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus BUMDes agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. usaha untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompok.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra: Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki potensi ekonomi desa yang cukup besar terutama di sektor pertanian hortikultura, perdagangan hasil pertanian, serta usaha mikro berbasis masyarakat desa. Namun demikian, sebagian pengurus BUMDes masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan proposal usaha untuk pengembangan unit usaha, serta pemanfaatan pemasaran digital.

Administrasi keuangan yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Selain itu, kemampuan dalam menyusun proposal usaha juga sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan

pendanaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi BUMDes untuk memasarkan produk dan jasa secara lebih luas melalui media sosial dan platform digital.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes melalui pemahaman yang lebih baik mengenai administrasi dan pencatatan keuangan usaha, peningkatan kemampuan dalam menyusun proposal usaha, serta penguasaan keterampilan memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran produk. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pengurus BUMDes mampu mengelola usaha desa secara lebih sistematis, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Manfaat kegiatan ini dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pengurus BUMDes, kegiatan ini memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, dan pemasaran digital. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini mendukung pengembangan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pemahaman tentang peran strategis BUMDes. Sementara bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi wujud nyata implementasi Tri Dharma, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kombinasi pendekatan teoritis dan praktis. Materi disampaikan melalui ceramah untuk memberikan pemahaman dasar, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat mengklarifikasi serta memperdalam pengetahuan. Selain itu, praktik langsung diberikan untuk melatih

keterampilan secara nyata sesuai kebutuhan pengurus BUMDes. Kegiatan juga mencakup pendampingan intensif dalam penyusunan proposal usaha dan pencatatan keuangan, sehingga peserta memperoleh pengalaman langsung yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan usaha desa.

Tahapan kegiatan dimulai dari tahap persiapan, yang mencakup perencanaan materi, koordinasi dengan mitra desa, dan penyiapan sarana pelatihan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pelatihan, di mana peserta mengikuti ceramah, diskusi, dan praktik sesuai agenda. Setelah itu dilakukan tahap pendampingan, yaitu memberikan bimbingan langsung kepada pengurus BUMDes dalam menyusun proposal dan melakukan pencatatan keuangan. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, yang bertujuan menilai efektivitas pelatihan serta mengukur peningkatan kapasitas peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Awal

Survei awal dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDes dalam Bidang Administrasi Keuangan, Penyusunan Proposal Usaha, dan Pemasaran Digital di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan" merupakan tahapan krusial yang berfungsi bagi keseluruhan program. Survei ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif mengenai kondisi BUMDes, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas, kebutuhan spesifik, serta potensi pengembangan yang dapat dijadikan dasar perumusan materi pelatihan. Tujuan utama dari survei awal adalah mengidentifikasi kesenjangan kapasitas antara kondisi ideal pengelolaan BUMDes dengan keterampilan

aktual yang dimiliki pengurus. Kesenjangan ini mencakup aspek teknis (pencatatan keuangan yang belum konsisten), aspek perencanaan (proposal usaha yang belum memenuhi standar kompetitif), dan aspek pemasaran (minimnya pemanfaatan teknologi digital).

Survei awal memperlihatkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan di sebagian besar BUMDes masih dilakukan secara manual dengan pencatatan sederhana menggunakan buku kas. Format pencatatan yang digunakan belum seragam, sehingga terdapat variasi dalam cara pengurus mencatat pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menyebabkan laporan keuangan sulit dibandingkan antar periode dan menyulitkan proses evaluasi. Selain itu, pencatatan sering kali hanya dilakukan pada saat transaksi besar, sementara transaksi kecil atau rutin tidak selalu terdokumentasi. Dalam aspek penyusunan proposal usaha, survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus belum terbiasa menyusun dokumen perencanaan usaha yang sistematis. Proposal yang ada umumnya hanya berupa uraian singkat mengenai ide usaha, tanpa dilengkapi analisis pasar, proyeksi keuangan, maupun strategi operasional yang jelas. Struktur proposal cenderung tidak mengikuti format baku yang biasanya dipersyaratkan oleh lembaga keuangan, pemerintah, atau mitra bisnis. Selain itu, pengurus BUMDes masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Temuan survei pada bidang pemasaran digital menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih sangat rendah. Sebagian besar pengurus belum memiliki pemahaman yang memadai tentang strategi pemasaran berbasis digital. Media sosial seperti Facebook atau WhatsApp memang

digunakan, tetapi lebih bersifat personal, bukan sebagai bagian dari strategi branding yang terencana. Produk BUMDes masih dipasarkan secara konvensional melalui pasar lokal atau jaringan personal, sehingga akses ke konsumen di luar wilayah Kecamatan Modoinding sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan potensi pasar produk BUMDes belum tergarap secara optimal, padahal peluang untuk memperluas pasar melalui teknologi digital sangat besar. Survei awal yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pengurus BUMDes di Kecamatan Modoinding. Melalui pendekatan observasi dan wawancara, diperoleh informasi yang mendalam tentang praktik administrasi keuangan, kemampuan penyusunan proposal usaha, serta pemanfaatan pemasaran digital. Temuan yang muncul menegaskan bahwa kapasitas pengurus masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknis maupun strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas pengelolaan BUMDes secara keseluruhan. Bagian administrasi keuangan menunjukkan perlunya sistem pencatatan yang lebih konsisten dan akuntabel, penyusunan proposal usaha menyoroti kebutuhan akan dokumen perencanaan yang sistematis dan kompetitif, sementara pemasaran digital mengungkapkan minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses pasar.

Kegiatan Penyuluhan

BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan

upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat. Dalam hal BUMDES tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDES didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDES (Akbar, 2023). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah strategis yang diamanatkan kepada pemerintah desa guna mengoptimalkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Secara fungsional, BUMDes diposisikan sebagai institusi sosial-ekonomi yang berperan sebagai entitas komersial dengan kapasitas untuk bersaing secara kompetitif di luar lingkup wilayah pedesaan (Ramadana et al., 2013).

Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes adalah sebuah proses pembelajaran dan pendampingan yang bertujuan agar para pengelola mampu menjalankan organisasi dan unit usaha desa secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari penguatan pemahaman dasar mengenai fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan teknis seperti pencatatan keuangan, penyusunan laporan, dan penerapan tata kelola yang sesuai dengan regulasi. Selain aspek administratif, peningkatan kapasitas juga menyentuh kemampuan manajerial, misalnya bagaimana menyusun rencana bisnis, melakukan analisis potensi desa, serta mengambil keputusan yang melibatkan musyawarah dengan masyarakat. Di sisi lain, pengurus juga perlu dibekali

keterampilan pemasaran dan digitalisasi agar produk atau jasa BUMDes dapat dikenal lebih luas melalui media sosial maupun platform daring.

1. Profesionalisme Administrasi, yaitu administrasi dan tata kelola keuangan

Profesionalisme administrasi dan tata kelola keuangan menjadi dasar utama agar lembaga ini dapat dipercaya oleh masyarakat desa dan mitra eksternal. Pengurus BUMDes dituntut untuk mampu menyusun sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun akurat, misalnya melalui buku kas harian atau aplikasi digital sederhana. Laporan keuangan harus disusun secara berkala dan dipublikasikan kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi. Selain itu, setiap penggunaan dana desa maupun keuntungan usaha harus melalui mekanisme musyawarah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik atau kecurigaan.

Dalam tata kelola keuangan BUMDes, BUMDes bukan hanya sebagai suatu badan usaha, melainkan lembaga ekonomi desa yang mengelola dana publik dan aset bersama. Karena itu, pengelolaan keuangan BUMDes tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Empat prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dasar keputusan, dan kepatuhan hukum yang menjadi pilar yang saling melengkapi. Jika dijalankan secara konsisten, keempat aspek ini akan memastikan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dan mitra eksternal.

Transparansi dalam konteks BUMDes berarti setiap aliran dana, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dapat diketahui

oleh masyarakat desa. Laporan keuangan tidak boleh disimpan hanya untuk internal pengurus, melainkan dipublikasikan melalui forum musyawarah desa atau media informasi desa. Transparansi ini menciptakan rasa percaya dan mencegah munculnya kecurigaan atau konflik.

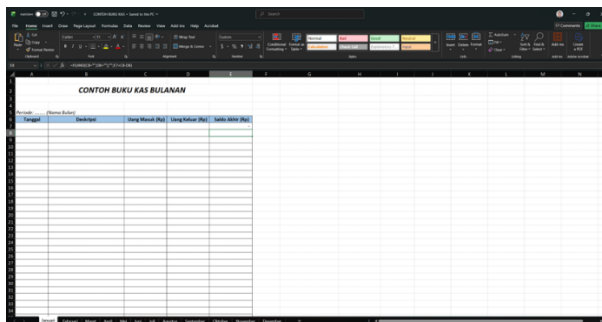
Akuntabilitas menekankan bahwa pengurus BUMDes bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan penggunaan dana. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui pencatatan yang rapi, bukti transaksi yang sah, serta laporan yang dapat diaudit. Akuntabilitas membuat pengurus tidak hanya menjawab kepada masyarakat desa, tetapi juga kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

Dasar keputusan yaitu bahwa setiap kebijakan keuangan BUMDes harus dari analisis kebutuhan dan potensi desa, serta hasil musyawarah bersama. Keputusan tidak boleh bersifat sepihak atau berdasarkan kepentingan pribadi. Misalnya, sebelum membuka unit usaha baru, pengurus harus melakukan studi kelayakan dan meminta persetujuan masyarakat desa. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan kolektif.

Kepatuhan hukum memastikan bahwa seluruh kegiatan BUMDes berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Menteri, maupun aturan lokal. Kepatuhan ini mencakup penggunaan dana desa sesuai ketentuan, pelaporan pajak bila diperlukan, serta penerapan aturan kerja yang melindungi hak-hak pekerja. Dengan kepatuhan hukum, BUMDes memiliki legitimasi yang kuat dan terhindar dari sanksi.

Sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola dana publik, BUMDes dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dasar keputusan yang tepat, serta kepatuhan terhadap hukum. Buku kas

bulanan BUMDes ini disusun sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan yang professional. Melalui pencatatan kas bulanan, setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dapat ditelusuri dengan jelas, sehingga masyarakat desa memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi keuangan BUMDes. Berikut ini merupakan contoh buku kas menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan fitur yang ada untuk membuat perhitungan secara otomatis.



Gambar 1. Contoh Buku Kas Bulanan

Penyusunan buku kas bulanan BUMDes menggunakan aplikasi Microsoft Excel dipandang sebagai langkah strategis. Excel dipilih karena mampu menyediakan format pencatatan yang sistematis, mudah diakses, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Melalui Excel, setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dapat dicatat secara berurutan, saldo otomatis terhitung, dan laporan bulanan dapat dirangkum dengan akurat. Penggunaan Excel juga selaras dengan prinsip tata kelola keuangan BUMDes. Transparansi tercermin dari laporan yang dapat dicetak dan dipublikasikan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan yang rapi dan bukti transaksi yang terdokumentasi dengan baik.

2. Perencanaan Strategis, yaitu penyusunan proposal bisnis dan kerjasama

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting yang memastikan arah pengembangan usaha desa berjalan terstruktur dan berkelanjutan. Perencanaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Dua aspek utama yang menjadi fokus adalah penyusunan proposal bisnis dan pengembangan kemitraan/kerja sama.

Penyusunan proposal bisnis dalam BUMDes bertujuan untuk merumuskan ide usaha secara sistematis, mulai dari analisis potensi desa, perhitungan kebutuhan modal, proyeksi keuntungan, hingga strategi pemasaran. Proposal ini menjadi alat komunikasi yang menjelaskan kelayakan usaha kepada masyarakat desa, pemerintah daerah, maupun calon mitra. Dengan adanya proposal yang jelas dan terukur, pengurus BUMDes dapat menunjukkan profesionalisme serta meningkatkan peluang memperoleh dukungan pendanaan atau investasi. Sementara itu, kerja sama atau kemitraan merupakan langkah strategis untuk memperluas jaringan usaha dan memperkuat kapasitas BUMDes.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Dr. Ir. Lyndon R. J. Pangemanan, ME

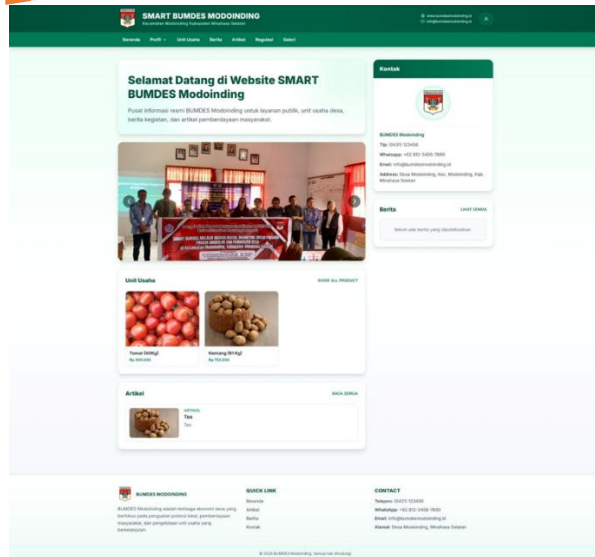
Kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, maupun sektor swasta. Melalui kemitraan, BUMDes dapat memperoleh akses modal, teknologi, pendampingan manajerial, serta pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang menekankan dasar keputusan berbasis musyawarah dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga setiap kerja sama dijalankan secara legal dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam penyusunan proposal bisnis BUMDes, struktur yang terdiri dari executive summary, analisis potensi desa, model usaha, proyeksi keuangan, dan analisis risiko berfungsi sebagai kerangka sistematis yang menunjukkan profesionalisme pengurus dalam merancang usaha desa.

3. Digitalisasi Pemasaran, yaitu strategi pemasaran digital

Digital marketing memungkinkan perusahaan membangun komunikasi dua arah, mendengarkan aspirasi pelanggan, serta menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ayesha et al., 2022). Digital marketing dapat dipahami sebagai aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk memperkenalkan produk, layanan, maupun merek kepada target audiens. Tujuan utamanya adalah mendukung pencapaian sasaran bisnis, seperti meningkatkan kesadaran merek, memperoleh calon pelanggan, serta mendorong penjualan melalui berbagai kanal digital. Secara akademik, digital marketing juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan perangkat, media, dan platform berbasis teknologi digital untuk merencanakan, mengukur, sekaligus mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, digital

marketing membuka peluang interaksi langsung dengan konsumen, yang berkontribusi pada peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan (Harahap, 2025).

Dalam konteks BUMDes, digital marketing dipahami sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk dan layanan desa kepada masyarakat yang lebih luas. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki keterbatasan dalam hal promosi tradisional, sehingga pendekatan digital menjadi solusi efektif untuk meningkatkan visibilitas usaha, memperluas pasar, dan memperkuat citra kelembagaan. Melalui digital marketing, BUMDes dapat menampilkan potensi lokal secara profesional, sekaligus membangun interaksi langsung dengan konsumen maupun mitra eksternal. Platform digital yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar sarana promosi. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business bukan hanya berfungsi untuk memperkenalkan produk, tetapi juga membangun interaksi yang intens dengan konsumen. Dalam kegiatan PkM, tim pelaksana telah menyiapkan website resmi BUMDes sebagai fondasi utama digital marketing.



Gambar 3. Website Smart BUMDes Kecamatan Modoinding

Website ini berperan sebagai pusat informasi yang kredibel, menampilkan katalog produk, profil organisasi, serta laporan kegiatan yang dapat diakses publik. Website juga menjadi simbol profesionalisme BUMDes dalam mengelola usaha desa, sekaligus sarana transparansi yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan integrasi website, media sosial, marketplace, dan platform lainnya, BUMDes memiliki ekosistem digital yang komprehensif untuk mendukung pemasaran, memperluas jaringan kerja sama, dan meningkatkan keberlanjutan usaha desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan dalam Program Kemitraan Masyarakat dengan fokus pada penguatan kapasitas pengurus BUMDes telah memberikan hasil yang signifikan. Melalui rangkaian materi yang mencakup administrasi keuangan, perencanaan strategis, dan digitalisasi pemasaran, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Website

Marketplace BUMDes yang dihasilkan sebagai luaran kegiatan menjadi bukti nyata penerapan digital marketing, sekaligus fondasi penting bagi pengembangan usaha desa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus, tetapi juga menumbuhkan motivasi untuk mengelola BUMDes dengan lebih modern dan berdaya saing.

Saran

Pengurus BUMDes terus mengembangkan keterampilan administrasi dan keuangan melalui pelatihan lanjutan serta penerapan sistem pencatatan yang konsisten. Dalam aspek perencanaan strategis, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan agar proposal bisnis yang disusun dapat diimplementasikan secara nyata dan mendukung kerja sama dengan mitra eksternal. Sementara itu, pada bidang digitalisasi pemasaran, pengurus BUMDes diharapkan aktif memanfaatkan website, media sosial, dan marketplace yang tersedia, serta melakukan pembaruan konten secara rutin untuk menjaga relevansi dan meningkatkan daya tarik produk desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi. Artikel ini merupakan bagian dan salah satu luaran dari Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM-K2 didanai oleh PNBP Universitas Sam Ratulangi Tahun 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2023. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Ayesha, I., Pratama, I. W. A., Hasan, S., Amaliyah., Effendi, N. I., Yusranto, T., Diwyarthi, N. D. M. S., Utami, R. D., Firdaus, A., Mulyana, M., Fitriana.,

Norhidayati., Egim, A. S. 2022. Digital Marketing (Tinjauan Konseptual). Penerbit: PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang.

Harahap, K. 2025. Digital Marketing: Strategi dan Implementasi dalam Bisnis Modern. Penerbit: PT. Media Penerbit Indonesia. Medan.

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., dan Suwondo. 2013. KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 (6), Agustus 2013. Malang.